

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teoritis dan Yuridis Tentang Pidana

##### a. Pengertian Pidana/Hukuman (*Straf*)

Pidana (*straf*), pada dasarnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

4

Nampaknya Andi Hamzah membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, hukum administrative, dan hukum pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>5</sup>

Menurut Satochid Kartanegara,<sup>6</sup> bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan

---

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung : 2005, halaman 1

<sup>5</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung : 1987, halaman 17

<sup>6</sup> Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, halaman 275-276

siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan.

**b. Bentuk-bentuk Pidana (*Strafsoort*)**

Secara keilmuan, bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Pidana jiwa misalnya pidana mati;
2. Pidana badan pelaku misalnya pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (misal jari tangan), dicap bara (*brandmerk*), dan lain sebagainya;
3. Pidana kemerdekaan pelaku misalnya pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, *penginterniran*, penawanan, dan sebagainya;
4. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
5. Pidana atas harta benda/kekayaan misalnya pidana denda, perampasan barang tertentu, membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya<sup>7</sup>

Dalam sistem hukum Islam, pidana badan dan pidana jiwa merupakan merupakan pidana yang paling dikenal. Sedangkan, dalam hukum pidana Barat pidana penjara menjadi pilihan yang lebih banyak dimasukkan dalam pasal-pasal KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Dalam sistem hukum adat Indonesia, pidana kemerdekaan juga tidak terlalu dikenal.

---

<sup>7</sup> SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, halaman 452

Selain pidana tersebut diatas, hakim juga dapat menjatuhkan putusan yang berbentuk perintah, antara lain:

- a. Perintah untuk menempatkan seseorang yang sakit/cacat jiwa dalam rumah sakit jiwa (Pasal 44 KUHP). Dalam pengembangannya juga pengobatan paksa bagi seorang *psychoopaat*;
- b. Pendidikan paksa dan pengembalian seseorang anak yang belum cukup umur kepada orang tuanya (Pasal 45 KUHP).

Bentuk pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

- a. Pidana Pokok terdiri dari:
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

### **c. Tujuan Pidana**

Dalam pembahasan tujuan pidana ini tidak dapat kita pisahkan dari teori-teori hukum pidana (*strafrecht theorien*). Teori-teori hukum pidana tersebut pada garis besarnya bisa dibagi ke dalam empat macam teori, yaitu:

- a. **Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)**

Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini adalah bertitik pangkal pada pembalasan. Dengan kata lain, menurut teori ini setiap kejahatan harus disertai dengan pidana. Pidana ini mutlak. Artinya, pidana tersebut merupakan suatu keharusan dan tidak boleh tidak. Tidak ada istilah tawar menawar. Siapa yang melakukan kejahatan harus dipidana dengan tanpa melihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Yang dilihat bukan masa depannya, melainkan masa lampau. Dalam teori ini, kepuasan hatilah yang dikejar, sedangkan yang lain tidak. Teori pembalasan ini bisa terbagi atas dua macam, yaitu:

1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
2. Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

**b. Teori Relatif (*Doel Theorien*)**

Teori ini bertitik tolak pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata

tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Menurut sifat tujuannya teori ini dapat dibagi tiga macam, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
3. Bersifat membinasakan

Adapun menurut sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*generale preventie*)
2. Pencegahan khusus (*spciale preventie*)

Teori relatif yang tertua adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga semua orang menjadi taubat karenanya.

Sedangkan teori relative yang lebih modern dikenal dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

#### **c. Teori Gabungan (*Vernigings Theorien*)**

Apabila ada dua pendapat yang saling berhadapan biasanya ada suatu pendapat yang berada di tengah. Demikian juga dalam teori hukum pidana ini, disamping adanya teori absolut dan teori relative ada pula teori ketiga yang

disamping adanya unsur pembalasan juga mengakui unsur memperbaiki pelaku. Teori ini dikenal dengan teori gabungan.

#### **d. Teori Pembinaan**

Teori ini lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya agar supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.<sup>8</sup>

### **B. Tinjauan Teoritis dan Yuridis Tentang Pidana Mati**

#### **a. Pengertian Pidana Mati**

Pidana mati atau yang dikenal dengan istilah *capital punishment* merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat. Prof. Roeslan Saleh memaparkan pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi.<sup>9</sup> Pembunuhan yang diadministrasi oleh negara. Pelaksanaanya dapat ditangguhkan sampai Presiden menyetujui pelaksanaan pidana mati bagi terpidana. Jadi, pidana mati merupakan

---

<sup>8</sup> Ruba'i, Masruchin dalam A. Fuad Usfa, SH., M.Si dan Tongat, SH., M.Hum, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, UMM Press, 2004, Halaman 147

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta : Aksara Baru, 1978, halaman 12

nestapa berupa kematian atau hilangnya nyawa seseorang. Kematian ini terjadi melalui gagalnya fungsi salah satu dari tiga pilar kehidupan : Pertama, otak (*central nervous system*); kedua, jantung (*circulatory system*), dan yang ketiga adalah paru-paru (*respiratory system*).

## **b. Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Mati**

### **1. KUHP**

- a. Makar membunuh kepala negara, Pasal 104;
- b. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia , Pasal 111 ayat (2);
- c. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang, Pasal 124 ayat (3);
- d. Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1);
- e. Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, Pasal 140 ayat (3) dan 340;
- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4);
- g. Pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai, dan dikali sehingga ada orang mati, Pasal 444;
- h. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124;
- i. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan Angkatan perang, Pasal 127 dan 129;
- j. Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2).

### **2. Diluar KUHP**

- a. UU darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata api
- b. Penetapan Presiden No. 5 tentang Wewenang memperberat ancaman mati terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- c. Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi
- d. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.
- e. UU No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988
- f. UU No. 35 Tahun 2009ak tentang Narkotika
- g. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- h. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

**c. Orang-orang Yang Tidak Boleh Dijatuhi Pidana Mati**

**1. Anak-anak**

Hukum Indonesia secara tegas dan jelas menyatakan bahwa hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada anak. Secara komprehensif larangan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup terhadap anak tertulis pada: Pasal 66 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 3 huruf f UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



(SPPA); dan Pasal 64 huruf f UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kovenan Sipol menekankan dengan tegas bahwa orang berusia dibawah 18 tahun pada saat kejadian berlangsung, tidak boleh dijatuhi hukuman mati, meskipun pada saat persidangan dan putusan dijatuhkan usianya melebihi 18 tahun.<sup>10</sup>

## **2. Lansia atau Lanjut Usia**

Hukum di Indonesia mengatur mengenai batas minimum penjatuan pidana mati, yaitu 18 tahun bagi anak-anak. Namun tidak mengatur mengenai batas usia maksimum orang dikenakan pidana mati, hal ini tentu tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan ketentuan internasional terkait terpidana mati lanjut usia.<sup>11</sup>

## **3. Orang Sakit Mental**

Kitab undang-undanh hukum pidana mengatur mengenai ketentuan otang sakit mental tidak dapat dipidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan tersebut disebut sebagai alasan pemaaf. Orang sakit mental adalah salah satu contoh subjek yang bisa dikenai alasan pemaaf. Dalam Pasal 44 KUHP disebutkan: *“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”*

## **4. Perempuan Hamil dan Baru Melahirkan**

Hukum di Indonesia juga mengatur alasan penundaan pidana mati salah satunya kepada wanita hamil dan baru melahirkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 UU 2/PNPS/1964 yang berbunyi: *“Apabila terpidana hamil, maka*

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 6 ayat (5) ICCPR

<sup>11</sup> Lihat Resolusi ECOSOC 1989

*pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.”*

### **C. Tinjauan Teoritis dan Yuridis Tentang Pidana Bersyarat/Pidana Percobaan**

#### **a. Pengertian Pidana Bersyarat**

Pidana bersyarat, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pidana/hukuman percobaan, adalah sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Seperti misalnya, pidana harus dijalankan jika sebelum masa percobaan tersebut selesai, orang tersebut melakukan tindak pidana. Ini berarti jika orang tersebut tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan, maka pidana tersebut tidak perlu dijalankan. Karena pidana bersyarat tersebut bergantung pada apakah orang tersebut melakukan tindak pidana selama masa percobaan, maka sering disebut pidana percobaan.

Pidana bersyarat adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu. Pidana bersyarat ini diatur dalam Pasal 14a KUHP yang berbunyi:

*(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah.*

Sederhananya, Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*” (halaman 183-184) menjelaskan mengenai pidana penghukuman bersyarat (pidana bersyarat) yang daitur dalam Pasal 14a dan seterusnya KUHP, bahwa apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh hakim, seperti apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.

Wirjono (Ibid, halaman 184) juga menambahkan bahwa dalam praktik, hukuman semacam ini jarang sekali dijalankan karena si terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa percobaan tidak melakukan suatu tindak pidana dan syarat khusus biasanya dipenuhi. Disamping itu, apabila syarat-syarat dipenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan lagi dari hakim dan ada kemungkinan hakim belum memerintahkan supaya hukuman dijalankan, yaitu apabila misalnya si terhukum dapat menginsafkan hakim bahwa si terhukum dapat dimaafkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat.

Jadi, berdasarkan bunyi Pasal 14a KUHP dan penjelasan Wirjono diatas dapat kita lihat bahwa pidana bersyarat memiliki keterkaitan dengan masa percobaan selama pidana bersyarat itu dilakukan, yakni suatu pembedaan dimana pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan (salah satunya) karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis.<sup>12</sup>

#### **b. Syarat-syarat Dalam Putusan Hakim**

---

<sup>12</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, SH., *Adakah Perbedaan Antara Pidana Bersyarat dan Pidana Percobaan*, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 7 Januari 2020

Ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang wajib ditaati oleh si terpidana untuk dapat dibebaskan dari pelaksanaan pidana tersebut, yaitu:<sup>13</sup>

a. Syarat Umum

Yaitu bila hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusannya, harus ditetapkan secara umum. Syarat umum harus ditetapkan oleh hakim dalam waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana.

b. Syarat Khusus

Syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat khusus, hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian akibat yang timbul oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian.<sup>14</sup>

**D. Tinjauan Teoritis dan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum**

**a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang wajib diberikan oleh negara melalui struktur penegak hukumnya agar tercipta rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

---

<sup>13</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 60

<sup>14</sup> Sapto Handoyo D.P., *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pakual Law Review, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hal. 28

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

## **b. Macam-macam Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

### **2. Perlindungan Hukum Represif**

Merupakan perlindungan berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah

---

<sup>15</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, halaman 3

dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

#### **E. Konsep Hak Asasi Manusia**

Gagasan mengenai hak asasi manusia ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati dimana pada zaman kuno yaitu filsafat stoika hingga ke zaman modern dengan tulisan-tulisan hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot, dan selanjutnya pada zaman pasca Renaisans, John Locke mengajukan pemikiran tentang hukum kodrati sehingga melandasi munculnya revolusi yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke 17 dan 18.

Pemikiran tentang hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi properti-properti dengan selimut suci. Motif tersebut diakui sebagai hak fundamental dari setiap individu dalam hidupnya. Namun uniknya dibalik sifat konservatif gagasan hukum kodrati, ternyata tersimpan pula motif yang revolusioner, hal ini terbukti ketika pemikiran hukum kodrati tentang kesetaraan manusia terkandung dalam dokumen hukum di Amerika dan Perancis yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Sebuah postulasi pemikiran yang diajukan oleh John Locke bahwa semua individu dikaruniai oleh Tuhan hak melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang tidak dapat

---

<sup>16</sup> Antonius Cahyadi dan E Fernando M Manulang, *Pengantar Filsafat Hukum, cet. 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 42

dicabut oleh negara sekalipun. Melalui suatu kontrak sosial perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara dengan tujuan agar negara dapat menjamin dan melindungi terlaksananya hak-hak tersebut. Jika sampai negara mengabaikan hak-hak tersebut maka oleh John Locke diperbolehkan untuk menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati dan menjamin hak-hak tersebut.

Inilah kedaulatan rakyat awam yang kini telah mampu berartikulasi untuk menuntut pengakuan atas statusnya yang baru warga bebas pengembalian hak yang kodrati, atas dasar keyakinan bahwa suara kolektif mereka adalah sesungguhnya suara Tuhan *vox populi vox dei* disinilah bermulanya pemikiran ulang tentang batas-batas kewenangan raja disatu pihak dan luasnya hak dan kebebasan rakyat yang asasi dilain pihak. Dalam pemikiran baru ini, kuasa raja atau kepala negara beserta aparatnya itu kini tidak lagi boleh dikonsepsikan sebagai refleksi kekuasaan Tuhan yang oleh sebab itu juga tak terbatas. Kekuasaan negara ini mestilah terbatas dan punya batas, dibatasi oleh dan berdasarkan perjanjiannya dengan rakyat.



